

Data Perdagangan Orang Juni 2014

Meskipun Provinsi NTT termasuk penyumbang *human trafficking* tertinggi di Indonesia, tetapi hingga Juni 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak memiliki *database* tenaga kerja korban perdagangan orang. Hal ini menjadi perhatian utama anggota DPRD Provinsi NTT ketika berdialog dengan para birokrat di lembaga ini. DPO IRGSC Edisi Juni 2014 memuat 28 berita terkait *human trafficking*. Diantaranya terkait (1) harga per kepala TKI ilegal di Batam, (2) rekrutmen tenaga kerja asal NTT ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, dan (3) aksi massa terkait tumpulnya penegakan hukum akibat perdagangan orang.

Salah satu hal penting yang disorot di DPO IRGSC Bulan Juni 2014 adalah bisnis perdagangan orang menjadi incaran banyak pelaku pasar 'tenaga kerja' yang menjual per kepala sebesar 5 juta rupiah. Angka 5 juta didasarkan pada pengakuan seorang korban yang disampaikan oleh Tania Kase yang bekerja kepada PT.Budi Mulia (No.21).

DPO (Data Perdagangan Orang) IRGSC merupakan bagian dari upaya menjaga ingatan. DPO adalah publikasi regular yang berisikan ringkasan berita di tiga media harian utama di NTT yakni *Pos Kupang* (PK), *Timor Express* (TE) dan *Victory News* (VN) sebagai referensi utama, yang memuat persoalan seputar migrasi tenaga kerja, khususnya yang terkait dengan perdagangan orang (*human trafficking*) baik di lingkup domestik maupun internasional. Selain tiga media di atas, DPO IRGSC juga menggunakan berita *on line* lain sebagai alat verifikasi. Satu dekade pasca kasus Nirmala Bonat terbukti penanganan buruh migran tidak semakin baik, sebaliknya semakin diterlantarkan di kampung halaman sendiri, oleh berbagai institusi pemerintah, maupun para pelaku dari sektor privat (PPTKIS maupun para PL (Petugas/Perekrut Lapangan))

Penerbitan **DPO IRGSC** adalah bagian dari pengembangan *NTT Studies* oleh **IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)**. **Peneliti:** Arif Rahman, Juwita Boboy, Randy Banunaek, Ragil Supriyanto Samid, Gregorius Aviero, Rosna Bernadetha, Yadi Diaz, John Petrus Talan, Joseph Robert, Indra Yohanes Kiling **Koordinator:** D.Elcid Li. Riset ini merupakan bagian dari 'riset aksi' yang dilakukan IRGSC dalam **Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang)** yang melibatkan berbagai elemen seperti: **JPIT** (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), **PIAR** (Pusat Informasi Advokasi Rakyat), **Rumah Perempuan**, **JRUK** (Jaringan Relawan Untuk Kemanusiaan) maupun secara individual.



Daftar Isi

Daftar Singkatan.....	5
Ringkasan Umum Juni 2014	7
Aksi Massa di Bulan Juni, Teguran Keras Bagi Para Polisi	8
Daftar Perusahaan yang Perlu Diawasi atau Dihukum/Diberikan Pinalti	9
Daftar Lembaga Publik yang Perlu Diawasi.....	13
Ringkasan Berita Media Cetak	14
Senin, 2 Juni 2014	14
Pura-pura Buang sampah (PK, Hal: 3)	14
Senin, 2 Juni 2014	14
Segera Pulangkan 21 TKW Dari Batam (PK, Hal: 3).....	14
Senin, 2 Juni 2014	14
Komisi C Panggil Disnakertrans Kota (TE, Hal: 11)	14
Senin, 2 Juni 2014	15
Buruh Migran rentan Masalah (VN, Hal: 14)	15
Selasa, 3 Juni 2014	16
TKW NTT Dominasi Bekerja di Luar Negeri (TE, Hal: 9,10)	16
Rabu, 4 Juni 2014.....	16
Dua TKW di Batam Dibawa Lari (VN, Hal:11).....	16
Kamis, 5 Juni 2014.....	16
Perekrut TKI Ilegal Ditahan (TE, Hal: 13).....	16
Jumat, 6 Juni 2014	17
Pejabat Disnakertrans NTT Saling Lempar Tanggung Jawab (PK, Hal: 3).....	17

Jumat, 6 Juni 2014	17
BMI Kabupaten Kupang 9.993 Orang (TE, Hal: 13)	17
Jumat, 6 Juni 2014	18
Pol PP Cegah <i>Trafficking</i> Dari Desa (VN, Hal:11).....	18
Sabtu, 7 Juni 2014	18
KP3 Laut Amankan Belasan TKI (VN, Hal: 10)	18
Senin, 9 Juni 2014	18
Jimmy Sianto: Lucu Nakertrans Tidak Punya Data (PK, Hal: 3)	18
Senin, 9 Juni 2014	19
9 Calon TKI asal Talibura Ditangkap (PK, Hal: 18)	19
Rabu, 11 Juni 2014	19
Tindak tegas Pelaku <i>Trafficking</i> (VN, hal: 11)	19
Senin, 13 Juni 2014	19
Polisi Tahan Perekrut TKI di Talibura (PK, Hal: 11).....	19
Senin, 13 Juni 2014	20
Penyelesaian Masalah TKI Dilematis (TE, Hal: 1, 7).....	20
Senin, 16 Juni 2014	20
Calon TKW Hilang di Penampungan (TE, Hal: 12)	20
Selasa, 17 Juni 2014	21
Ampera Tuntut.....	21
Penyelesaian Kasus TKW Medan (VN, Hal: 9)	21
Rabu, 18 Juni 2014	21
Orang NTT Sering Diperdagangkan Karena Murah (TE, Hal: 9, 10)	21

Rabu, 18 Juni 2014.....	22
Ampera Minta Kapolri Ambil Alih Kasus TKW Medan (VN, Hal: 9).....	22
Kamis, 19 Juni 2014.....	22
TKW Ilegal NTT Dijual Rp5 Juta per Kepala(VN, Hal:11)	22
Sabtu, 21 Juni 2014	22
Pemenuhan Lapangan Kerja Tugas Negara (TE, Hal: 13).....	22
Minggu, 22 Juni 2014	23
Polisi Gagalkan Calon TKI ke Malaysia (PK, Hal: 4).....	23
Senin, 23 Juni 2014	23
KP3 Laut Amankan 19 TKI Ilegal (VN, Hal:11)	23
Minggu, 24 Juni 2014.....	24
19 Canaker Ilegal Dipulangkan (TE, Hal: 10)	24
Rabu, 25 Juni 2014.....	24
TKI Batam Sudah Dipulangkan (VN, Hal: 11).....	24
Kamis, 26 Juni 2014.....	24
Padma NTT: Apa Maunya Migrant Care (PK, Hal: 5).....	24
Sabtu, 28 Juni 2014	25
Dewan Tuntut Tuntaskan Kasus TKW Batam (VN, Hal: 10)	25

Daftar Singkatan

AMPERA	: Aliansi Melawan Perdagangan Orang
BMI	: Buruh Migran Indonesia
BP3TKI	: Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BRIGJEN	: Brigadir Jendral
BRIGPOL	: Brigadir Polisi
CANAKER	: Calon Tenaga Kerja
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DISNAKERTRANS	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
GMKI	: Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
KADIS	: Kepala Dinas
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resor
KOMBESPOL	: Komisaris Besar Polisi
KOMPOL	: Komisaris Polisi
KP3	: Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan
MABES POLRI	: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PADMA	: Pelayanan Advokasi Untuk keadilan dan Perdamaian
PEM PROV	: Pemerintah Provinsi
PJTKI	: Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
POLDA	: Kepolisian Daerah
POLRESTA	: Kepolisian Resor Kota
PRT	: Pembantu Rumah Tangga
TKW	: Tenaga Kerja Wanita

TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
UNDANA	: Universitas Nusa Cendana
UNWIRA	: Universitas Widya mandira
WAKAPOLDA	: Wakil Kapolda

Ringkasan Umum Juni 2014

Meskipun Provinsi NTT termasuk penyumbang *human trafficking* tertinggi di Indonesia, tetapi hingga Juni 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT tidak memiliki *database* tenaga kerja korban perdagangan orang. Hal ini menjadi perhatian utama anggota DPRD Provinsi NTT ketika berdialog dengan para birokrat di lembaga ini. DPO IRGSC Edisi Juni 2014 memuat 28 berita terkait *human trafficking*. Diantaranya terkait (1) harga per kepala TKI ilegal di Batam, (2) rekrutmen tenaga kerja asal NTT ke perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, dan (3) aksi massa terkait tumpulnya penegakan hukum akibat perdagangan orang.

Salah satu hal penting yang disorot di DPO IRGSC Bulan Juni 2014 adalah bisnis perdagangan orang menjadi incaran banyak pelaku pasar 'tenaga kerja' yang menjual per kepala sebesar 5 juta rupiah. Angka 5 juta didasarkan pada pengakuan seorang korban yang disampaikan oleh Tania Kase yang bekerja kepada PT.Budi Mulia (No.21).

Fenomena ini mendorong pihak-pihak yang peduli untuk mulai melakukan aksi demi membenahi proses perlindungan kepada para tenaga kerja. Aksi itu meliputi diskusi bertajuk Buruh Migran dan Problematikanya yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan Untuk Semua di Lembata (No. 4), program pengentasan kemiskinan oleh Yayasan Tifa dan Rumah Perempuan pada tahun 2012 – 2014 (No. 9), pembinaan desa sadar ketentraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP (No. 10) dan puncaknya adalah aksi anti *trafficking* oleh Ampera pada 17 Juni 2014 (No. 18).

Seorang tokoh agama dalam perspektif Katholik adalah seorang gembala dengan tugas utamanya adalah menjaga keselamatan umat. Karena itu, ia harus memastikan bahwa umatnya yang hendak bekerja di tempat lain akan mengalami keadaan yang lebih baik. Untuk itu, semua proses harus dipastikan dengan baik sejak persiapan, penempatan dan perlindungan selama di tempat bekerja

Romo Leo Mali, Pr, 20 Juni 2014 (No.22)

Selain berita tentang pengiriman TKI ilegal, beberapa kasus pengiriman tenaga kerja ke provinsi lain juga menjadi sorotan surat kabar, diantaranya ke Kalimantan Timur dan Papua. Calon tenaga kerja Papua ditujukan sebagai pekerja rumah tangga, sedangkan untuk ke Kalimantan Timur ditujukan bekerja sebagai buruh kelapa sawit. Salah satu sorotan perlu diberikan kepada migrasi tenaga kerja ke Kalimantan yang dipekerjakan sebagai buruh perkebunan.

Di Kalimantan Timur sendiri sekitar 300-an perusahaan perkebunan, dan kelapa sawit beroperasi di 11 kabupaten/kota di sana. Dengan luas lahan yang luar biasa luas itu, mereka membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak. Luas lahan garapan tiap PT bervariasi antara 600 hektar hingga yang terbesar 20 ribu hektar.¹ Hingga saat ini belum ada perlindungan hukum untuk para tenaga kerja yang bermigrasi ke provinsi lain. Apalagi jika mereka bekerja tanpa kontrak, dan tanpa perlindungan. Proses rekrutmen umumnya dilakukan langsung di Timor Barat, oleh eks pekerja maupun karyawan PT terkait.

Aksi Massa di Bulan Juni, Teguran Keras Bagi Para Polisi

Aliansi Menolak Perdagangan Orang (Ampera) NTT tidak main-main dalam menghimpun partisipasi untuk beraksi. Sebanyak 84 organisasi yang memiliki hati untuk memberantas perdagangan orang dari NTT tergabung dalam aliansi ini. Organisasi seperti GMKI, J-RUK, Fakultas Teologi UKAW, IRGSC, J-PIT, Senat Fisip dan FH Unwira, BEM FH Universitas PGRI, BLM Undana, Pikul sampai Rumah Perempuan turut serta. Individu dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi bersatu tangan untuk menyuarakan tuntutan yang mereka rumuskan.

Sebanyak 84 organisasi bergabung dalam aliansi ini yang kemudian melakukan *long march* dari depan kampus Unwira Kupang menuju Polda NTT. Sebanyak 13 tuntutan terkait perdagangan orang di NTT disampaikan dalam orasi di depan markas Polda NTT. Aksi ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, namun oleh beberapa tokoh agama dan akademisi senior. Hal ini merefleksikan gerahnya masyarakat dengan ketidakbecusan penanganan kasus perdagangan orang oleh pihak berwajib terutama Polda NTT. Sebagai institusi yang mengayomi masyarakat, tentu ini harus mendorong Polda NTT bahkan Polri untuk melakukan bersih-bersih internal supaya tupoksi kepolisian kembali berjalan sebagaimana mestinya.

¹<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fditjenbun.pertanian.go.id%2Fpascapanen%2Ftinymcepuk%2Fgambar%2Ffile%2FKaltim.pdf&ei=gIKsVPDOI4ahyQS4joD4Ag&usg=AFQjCNGBwjRTcm4PwjA65HpA0WV41HJnQ&bvm=bv.83134100,d.aWw> [Dibaca tanggal 6 Januari 2015]

Memang selama ini hidup anggapan bahwa aksi demo massa adalah sesuatu yang negatif karena identik dengan kekerasan, oleh karena itu hanya 'cocok' dilakukan oleh mahasiswa yang dianggap masih 'hijau' dalam berpendapat. Berpendapat yang baik dan 'dewasa' selalu dikaitkan dengan duduk bermusyawarah untuk saling bertukar pendapat dan pikiran. Menyampaikan pendapat dengan 'duduk ngopi' tentunya bukan tidak pernah dipikirkan dan dilakukan oleh para organisasi yang memiliki kepedulian terhadap perdagangan orang di NTT. Beberapa organisasi bahkan selama bertahun-tahun telah melakukan advokasi 'sopan' yang dimaksud, namun bukannya perbaikan yang didapat, kasus perdagangan orang yang muncul malah semakin banyak dan berat.

Masyarakat yang jengah dengan tindak-tanduk otoritas pun memilih bersuara bersama dengan lebih lantang lewat aksi *long march* yang tergabung dalam Ampera NTT. Masyarakat belajar dari sejarah dimana Bumi Merah Putih disatukan dengan persatuan suara orang-orang yang peduli. Masyarakat juga tidak lupa kalau Nusantara tercinta juga berhasil 'merdeka' dari rezim otoriter dengan cara menyatukan suara dan beraksi bersama. Pihak otoritas semestinya menangkap sinyal ini. Pergolakan masyarakat jangan hanya dianggap angin lalu atau malah ingin dialihkan isu, karena sejarah tentu bukan tidak mungkin untuk terulang kembali.

Daftar Perusahaan yang Perlu Diawasi atau Dihukum/Diberikan Pinalti

Berdasarkan pemberitaan pada bulan Juni 2014, berikut ini daftar perusahaan yang perlu mendapatkan pengawasan lebih:

1. Tidak diketahui pelaku (No. 1)

- a. Pelanggaran: TKW tidak tahu alamat dan lokasi penampungan TKW secara persis. TKW merasa tidak betah, dicurigai karena diperlakukan dengan kurang layak.
- b. Korban: Ani Utangjua (44), Ibu tiga anak, asal Kabupaten Sumba Timur.
- c. Lokasi: daerah bernama Mutiara Timur, Kota Bekasi (alamat tepat tidak diketahui)
- d. Modus: Ani sudah tinggal sebulan lebih di lokasi penampungan dan sering sakit lalu tidak betah. Ani berusaha kabur melalui setelah berpura-pura ingin membuang sampah.
- e. Pelanggaran PPTKIS tidak memperbolehkan Ani untuk menghubungi keluarganya.

2. Ote (No. 6)

- a. Pelaku: Ote, diduga suruhan Ibu Lora, penyalur TKI yang tinggal di Tilong, Kab. Kupang.
- b. Korban: dua orang TKW asal NTT

- c. Pelanggaran: dua orang TKW dari 23 TKW yang sementara ditampung Romo Paskal di Batam untuk dipulangkan dibawa lari oleh Ote.
- d. Modus kriminalitas: Setelah melarikan TKW tersebut, Ote melakukan teror via sms dari *handphone* milik salah seorang TKW yang dibawa kabur kepada Romo Paskal.

3. Johanis Bifel, Marthinus Taone dan Mikael Sinlae (No. 7)

- a. Korban: 28 orang TKI
- b. Perusahaan tujuan PT.Muara Toyu Subur Lestari (MTSL).
 - i. Lokasi lahan perkebunan sawit: Kabupaten Pasir, Kecamatan Long Kali, Kalimantan Timur, khususnya Desa Muara Toyu, Desa Muara Piasa, dan Desa Bente Tualan
 - ii. Izin pengolahan lahan: 525/01/EK-Prod.I/2006 (beroperasi sejak 26 September 2006)
 - iii. Luas lahan: 12,000 hektar
 - iv. No kontak: Daeng (0811520999), Rianto (0816862907), Nanda (0818994272)
 - v. Alamat kantor di Jakarta: **PT Muara Toyu Subur Lestari**
Menara Karya Suite 18, Jl. HR Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2
P. 021 57944737
F. 021 57944745
- c. Pelaku: Johanis Bifel (Eks Karyawan PT.Muara Toyu Subur Lestari (MTSL), dan dua orang PL (Perekrut Lapangan) masing-masing Martinus Taone dan Mikael Sinlae. Johanis Bifel mengaku ia diberi upah per kepala 50 ribu rupiah. Martinus Taone dan Mikael Sinlae sendiri sempat melarikan diri ketika polisi menangkap Johanis Bifel.
- d. Saksi: Dua orang karyawan PT Muara Toyu Subur Lestari Evan Ricardo Nainggolan dan Rico Fernando Sibuea, keduanya merupakan karyawan PT.Muara Toyu Subur Lestari, yang bergerak di area lahan kelapa sawit Kalimantan
- e. Lokasi penangkapan: Pelabuhan Tenao Kupang
- f. Pelanggaran: merekrut dan mengirim 28 orang TKI yang diduga tidak memiliki dokumen resmi
- g. Wilayah Hukum: Polsek Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
- h. Tambahan: Berdasarkan hasil pencarian internet, secara legal para karyawan PT.Muara Toyu Subur Lestari berhak mendapatkan Upah Minimum Sektor Perkebunan Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) sebesar Rp. 1.850.000, tetapi informasi ini belum bisa dipastikan apakah dilaksanakan di oleh PT.MTSL di lokasi kerja.² Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Sawit Watch di Kalimantan Tengah misalnya upah pekerja sebesar 1,2 hingga 1,4 juta rupiah, atau per

² <http://www.ciputranews.com/ibu-kota-daerah/umsk-sektor-perkebunan-di-paser-rp1-851-000> [Diakses tanggal 6 Januari 2015]

hari sebesar Rp. 65.000. Dengan upah ini para buruh mengaku upah mereka tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk pengeluaran harian mereka menghabiskan: 1,2-1,5 juta per bulan, dan belum mencakupi kebutuhan lain seperti transportasi, uang sekolah anak dan lainnya. Sawit Watch mencatat bahwa utang terhadap perusahaan sebesar satu atau dua bulan gaji merupakan hal biasa. Akibatnya untuk menutupi utang para pekerja harus lembur, dan menyertakan istri dan anak mereka untuk ikut bekerja.³

- i. Usulan: Kontrak kerja di daerah rekrutmen merupakan hal yang penting dilakukan untuk mencegah pembiaran perusahaan terhadap PT yang mungkin amat eksploitatif dalam memperlakukan karyawan. Misalnya jika sakit PT tidak memiliki kewajiban untuk memperhatikan karyawan. Pembayaran BPJS bulanan kepada buruh sawit dan keluarganya perlu menjadi salah satu hal kunci yang dinegosiasikan dengan PT.

4. Tidak diketahui pelaku (No. 11)

- a. Pelanggaran: 12 orang TKI tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan.
- b. Korban:
 - i. 12 TKI asal Sabu Raijua, 1 laki-laki dan 2 perempuan
 - ii. Nama: Belasan calon TKI/TKW itu adalah Agustina Djara (22), Lorian Ledede (23), Damaris Ledede Mehe (21), Katarina Bullu (27), Agustina Raga (20), Markus Ha'u (21), Elisabet Gia (18), Desiana Riwu (20), Damu Djami (37), Marilnce lay (25) Bendelina Seke (21), dan Bendelina Lay (20).
- c. Rute: perjalanan laut, Kupang → Makassar
- d. Mereka ditangkap di Pelabuhan Tenau, dan diserahkan kepada Dinas Nakertrans NTT
- e. Wilayah hukum: Polda NTT

5. Anselmus Raja dan Benedikta Bliti (No. 13, No. 15)

- a) Pelanggaran: Pelaku perdagangan orang, dengan merekrut sembilan TKI yang diduga ilegal.
- b) Modus:
 - a. Benediktus Bliti, warga Lewomada merekrut dua orang wanita untuk bekerja di Papua sebagai PRT.
 - b. Anselmus Raja merekrut tujuh orang TKI untuk dipekerjakan di Malaysia.
 - c. Penangkapan dilakukan di Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka.
- c) Korban: sembilan orang TKI asal diduga dari Lewomada.

³ <http://www.gresnews.com/berita/sosial/14025-potret-buruh-sawit-terlupakan-di-tengah-hingar-bingar-peringatan-may-day/> [Dibuka tanggal 6 Januari 2015]

- d) Situasi: Anselmus Raja telah ditahan dan dijerat UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO (Tindak pidana perdagangan orang)
- e) Tujuan: Malaysia dan Papua.
- f) Wilayah hukum: Polda NTT

6. Flori (No. 23, 24, 25)

- a. Pelanggaran: merekrut 14 orang dewasa dan 2 anak-anak, dan membawa serta tiga balita, tanpa dilengkapi surat. Berasal dari Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTS, dan tidak memiliki dokumen resmi.
- b. Tujuan: Malaysia
- c. Rute: jalur laut via pelabuhan Tenau Kupang dengan KM Bukit Siguntang → Malaysia (rute detil tidak diketahui)
- d. Korban: 19 orang CTKI asal Kab. Malaka dan Kab. TTS. Berdasarkan berita ini setelah dibuka terdapat 11 orang dewasa, 5 orang anak-anak, dan tiga orang balita.
- e. Modus: Flori melarikan diri saat 19 orang TKI ini diamankan, sampai saat ini masih dalam pengejaran polisi.
- f. Wilayah hukum: Polda NTT

Catatan Tambahan:

- Maria Fatima Meo (21)
 - a. Dilaporkan oleh Adrianus Ndoen dari PT. **PT. Halgoni Alfa Abadi**, Kupang, yang terletak di jalan Hans Kapitan No 8 RT 017/RW karena keluar dari tempat penampungan tanpa pemberitahuan.
 - b. Saksi: Helena Pakpahan
 - c. Wilayah hukum: Polresta Kupang

Daftar Lembaga Publik yang Perlu Diawasi

Berdasarkan berita bulan Juni 2014, beberapa lembaga yang perlu diawasi dalam kasus perdagangan orang antara lain:

- 1) Dinas Nakertrans Provinsi NTT
 - i) Dinas Nakertrans Provinsi NTT tidak memiliki database TKI bermasalah, bahkan pejabatnya gemar saling lempar tanggung jawab.
- 2) Polda NTT
 - i) Kinerja yang lemah dalam menuntaskan kasus perdagangan orang, lagi-lagi disorot oleh publik, media sampai wakil rakyat di parlemen. Aksi dari masyarakat sudah memberi lampu merah kepada kinerja Polda NTT.
- 3) Pengelola Pelabuhan Tenau Kupang
 - i) Kembali lagi percobaan penyelundupan TKI ilegal terjadi di Pelabuhan ini pada bulan Juni 2014. Pengetatan pengawasan menjadi semakin penting.
 - ii) KP3 Laut, sebagai petugas kepolisian yang mengawasi pelabuhan perlu dibekali kemampuan identifikasi korban perdagangan orang yang memadai. Selain itu wartawan perlu memeriksa pernyataan polisi terkait pelaku yang melarikan diri dari tempat kejadian. Kebanyakan surat kabar hanya memuat pernyataan petugas, tanpa memeriksa kebenaran pernyataan.
- 4) Pemprov NTT
 - i) Lambatnya penanganan pemulangan 21 TKW asal NTT di Batam masih berlanjut sejak pemberitaan di bulan Mei 2014. Ini menjadi pekerjaan rumah besar terhadap Pemprov NTT. Publik bisa menjadi semakin gerah melihat tindakan lambat ini.
- 5) Polri
 - i) Kinerja Polda NTT yang sudah berulang kali diperingatkan wakil rakyat dan rakyat sendiri perlu mendapatkan perhatian khusus dari institusi dari pusat. Kehadiran Polri bisa memberikan obyektivitas dalam penertiban kinerja Polda NTT.

Ringkasan Berita Media Cetak

No	Tanggal	Judul	Ringkasan Berita
1	Senin, 2 Juni 2014	Pura-pura Buang sampah (PK, Hal: 3)	<p>Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Ani Utangjua (44) Kabur dari lokasi Penampungan di Kota Bekasi, Jawa Barat Setelah Berpura-pura membuang sampah. Selama sebulan lebih di lokasi penampungan, Ani kerap menderita sakit dan sudah tidak betah lagi. Oleh karena itu Ani minta dipulangkan kepada petugas tetapi tidak diijinkan.</p> <p>Karena tidak sabar Ani pun memberanikan diri untuk merencanakan usaha kabur. Ani menyiapkan tas yang berisi baju dua lembar yang diselipkan di gerbang tempat penampungan, dekat tempat sampah. "Saya Berpura-pura keluar untuk buang sampah dan akhirnya kabur dari sana minta sama Tukang ojek diantar ke kantor polisi terdekat," kata Ani saat membuat laporan di Mapolresta Bekasi Kota, Sabtu (31/5). Ibu yang sudah memiliki 3 orang anak ini tidak mengetahui pasti tempat penampungannya. "Saya tidak tahu alamat dan dimana lokasi penampungannya saya selama ini. Saya masih baru datang ke Jakarta ini," katanya.</p> <p>Dia hanya mengingat, tempat penampungan itu berlokasi di sebuah daerah bernama Mutiara Timur, Kota Bekasi. "Saya sudah tinggal selama lebih kurang sebulan. Saya kabur karena tidak betah dan sakit," ujarnya.</p>
2	Senin, 2 Juni 2014	Segera Pulangkan 21 TKW Dari Batam (PK, Hal: 3)	<p>Komisi D DPRD NTT memberi <i>deadline</i> (batas batas waktu, <i>Red</i>) kepada Pemda NTT selama tujuh hari kerja terhitung 28 Mei 2014 untuk segera memulangkan 21 tenaga kerja wanita (TKW) bermasalah asal NTT di Batam. 21 TKW bermasalah ini sudah sebulan lebih ditampung di Pastoran Paroki Batam tanpa perhatian pemerintah NTT maupun pemerintah setempat.</p> <p>Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT, Jimmi Sianto, SE ketika dihubungi melalui ponselnya, Jumat (30/5/2014) terkait perkembangan upaya pemulangan kasus 21 TKW NTT yang bermasalah di Batam.</p> <p>Menurutnya, tidak ada alasan tidak ada anggaran untuk pemulangan TKW itu. "Seperti yang sudah saya tegaskan dalam rapat komisi bahwa tidak ada alasan bahwa uang tidak ada. Masa daerah lain ada tapi NTT tidak punya dana? Karena itu, saya minta tujuh hari kerja itu sudah harus pulangkan TKW itu yang 21 bermasalah di Batam. Tujuh hari kerja sudah pulang. Tidak ada alasan bahwa tidak ada uang," tegasnya.</p>
3	Senin, 2	Komisi C Panggil	<p>Komisi C DPRD Kota Kupang, berencana memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), guna menggelar rapat kerja, tentang kesiapan tenaga kerja asal Kota Kupang. Pasalnya,</p>

	<p>Juni 2014</p>	<p>Disnakertrans Kota (TE, Hal: 11)</p>	<p>saat ini permintaan tenaga kerja dari Pemerintah Batam cukup tinggi. "Sebagai DPRD kami menangkap peluang ini, dan mendorong Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Nakertrans, menyiapkan tenaga kerja asal Kota Kupang, untuk dikirim dan bekerja di perusahaan-perusahaan di Batam," papar Ketua Komisi C DPRD Kota Kupang, Nikolaus Fransiskus kepada wartawan di Kantor DPRD Kota Kupang, pekan lalu.</p> <p>Menurutnya, sesuai hasil kunjungan Komisi C, ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beberapa kali, ada banyak program yang ditawarkan, salah satunya adalah penempatan tenaga kerja di dalam negeri, termasuk di Batam.</p> <p>Untuk itu, peluang tersebut tentunya sangat bagus, dan Pemerintah Kota bisa mengirim tenaga kerja terlatih asal Kota Kupang ke Batam.</p> <p>"Permintaan tenaga kerja untuk ditempatkan di Batam cukup banyak, yakni sekira 900 tenaga kerja. Pada tahun 2012 lalu, pemerintah Kota Kupang, hanya mampu mengirim 129 orang. Berkaitan hal ini, kami akan panggil Dinas Nakertrans untuk bisa mempertanyakan kesiapannya merebut peluang kerja ini," jelasnya.</p> <p>Ia mengaku, penempatan tenaga kerja untuk dipekerjakan di Batam, nilai kontraknya cukup besar, yang akan diterima tenaga kerja. Nilai kontraknya mencapai Rp 200 juta, selama dua tahun. Melihat peluang ini, bagaimana Pemerintah Kota Kupang meresponnya. Peluang ini sangat bagus, dari pada tenaga kerja harus pergi bekerja diluar negeri dengan gaji yang tidak jelas, dan diberangkatkan tidak prosedural, yang pada gilirannya merugikan tenaga kerja itu sendiri dan pemerintah.</p> <p>"Permintaan dari Batam soal tenaga kerja ini cukup banyak. Peluang yang ditawarkan ini, hendaknya direspon cepat oleh pemerintah Kota Kupang. Ini salah satu peluang untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Kupang," katanya.</p>
<p>4</p>	<p>Senin, 2 Juni 2014</p>	<p>Buruh Migran rentan Masalah (VN, Hal: 14)</p>	<p>Buruh migran (TKI dan TKW) di satu sisi memberikan dampak Ekonomi Bagi keluarganya, maupun sumbangsih kepada Negara dalam bentuk visa. Namun demikian, mereka, melahirkan banyak problem terkait hak-hak fundamental, buruh migran itu sendiri di mulai dari perekrutan, pemberangkatan, selama bekerja, hingga pemulangan.</p> <p>Tak hanya itu buruh migran pun rentan terhadap <i>trafficking</i> dan dampak sosial lain. Hal ini mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan Untuk Semua di Aula Hotel Lembata Indah Sabtu (31/5). Diskusi bertajuk Buruh Migran dan Problematikanya itu dihadiri oleh sejumlah LSM, utusan dari dinas /instansi pemerintah, institusi agama, jurnalis Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan utusan organisasi masyarakat di Kabupaten Lembata.</p>

5	Selasa, 3 Juni 2014	TKW NTT Dominasi Bekerja di Luar Negeri (TE, Hal: 9,10)	<p>Berbagai kasus sering menimpa tenaga kerja asal NTT yang bekerja di luar negeri. Tetapi, kasus yang terjadi tidak pernah menciutkan nyali warga NTT, untuk tetap kukuh menjadi TKI di luar negeri. Hal ini terbukti, hingga akhir bulan Januari 2014 masih tinggi tenaga kerja asal NTT yang berangkat bekerja ke luar negeri yakni sebanyak 187 orang.</p> <p>Sesuai data Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTT, TKI asal NTT yang berangkat bekerja ke luar negeri akibat persoalan ekonomi, membuat mereka tak peduli ancaman hilangnya nyawa. Apalagi, pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Dari jumlah 187 tenaga kerja, paling banyak didominasi tenaga kerja wanita (TKW).</p> <p>Hal ini dikatakan, <i>Project Manager</i> Tifa NTT, Muhammad Nour yang didampingi <i>Project Officer</i>, Yohannes Berchmans Bria kepada wartawan, akhir pekan kemarin.</p> <p>Menurut Muhammad, sesuai data BP3TKI menunjukkan dari 21 kabupaten/kota di NTT, penempatan tenaga kerja di luar negeri keadaan akhir Januari 2014 sebanyak 187 orang dengan jenis serta negara penempatan yakni paling banyak tenaga kerja perempuan di negara Malaysia sebanyak 135 orang.</p>
6	Rabu, 4 Juni 2014	Dua TKW di Batam Dibawa Lari (VN, Hal:11)	<p>Dua dari 23 TKW asal NTT yang di selamatkan oleh Romo Paskal di Batam dibawa lari. Kedua orang ini diduga dilarikan oleh oknum bernama Ote, orang suruhan ibu Lora, penyalur TKI yang berkediaman di Kabupaten Tilong, Kabupaten Kupang.</p> <p>Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT Jimmy Sianto kepada VN Selasa (3/6) menyampaikan informasi yang mereka dapatkan dari Romo Paskal penampung ke-23 orang TKW tersebut, dua orang TKW yang tidak disebutkan namanya itu tiba-tiba menghilang.</p> <p>Keduanya diduga kuat Dibawa lari oleh seorang pemuda bernama Ote yang merupakan suruhan ibu Lora. Tak hanya membawa lari keduanya, Ote juga sempat melakukan teror Romo Paskal via sms dari <i>handphone</i> milik salah seorang dari kedua TKW yang dibawa larinya. Menyambut informasi tersebut, Jimmy bersama kedua rekannya dari Komisi D, Tony Bengu dan Mercy Piwung serta kepala bidang pelatihan dan penampungan tenaga kerja di Nakertrans Provinsi NTT Paulus Kedang mendatangi Mapolda NTT. Kepada Wakapolda NTT Kombespol Monang Manulang di ruang kerjanya, mereka mempertanyakan proses penanganan kasus 23 TKW tersebut, juga meminta pihak kepolisian untuk menjamin keselamatan Romo Paskal. Mereka mendesak agar oknum bernama ibu Lora itu segera di tangkap.</p>
7	Kamis, 5 Juni 2014	Perekrut TKI Ilegal Ditahan (TE, Hal: 13)	<p>Perang terhadap pengiriman TKI ilegal di Kabupaten Kupang digencarkan. Terbukti, tiga tersangka resmi ditahan dan dua petugas perusahaan dikenai wajib lapor dalam kasus pengiriman 28 TKI ilegal oleh jajaran Polsek Kupang Tengah Polres Kupang akhir pekan lalu. Ketiga tersangka yang ditahan polisi</p>

			<p>masing-masing Johanis Bifel selaku perekrut yang sudah pernah kerja disana dari tahun 2008, Marthinus Taone dan Mikael Sonlae dari TTU yang juga petugas lapangan.</p> <p>Sedangkan dua saksi yakni Evan Ricardo Nainggolan dan Rico Frans Fernando Siubuea yang merupakan karyawan PT Muoro Toyu Subur Lestari Kalimantan cuma dikenai wajib lapor.</p> <p>Kapolsek Kupang Tengah, Iptu M Fachruddin kepada Timor Express, Senin (2/6) membenarkan penahanan perekrut TKI ilegal.</p>
8	Jumat, 6 Juni 2014	Pejabat Disnakertrans NTT Saling Lempar Tanggung Jawab (PK, Hal: 3)	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTT saling melempar tanggung jawab terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah bahkan, instansi ini tidak memiliki data tentang TKI yang bermasalah di dalam negeri maupun di luar negeri.</p> <p>Pos kupang beberapa kali di “bohongi” dan di-ping-pong sejumlah pejabat Disnakertrans NTT. Pos Kupang pernah membuat janji dengan Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans Provinsi, Simon Sabon Tokan untuk mengambil data yang dimaksud namun tidak berhasil.</p> <p>Lalu, Senin (2/6/2014) siang, setelah kembali membuat janji dengan Kepala Dinas (Kadis) Nakertrans Provinsi, Simon Sabon Tokan melalui telepon, Pos Kupang kembali menyambangi kantor ini. Pos Kupang Menemui Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan tenaga kerja Dinsos NTT, Paul Kedang dengan alasan lebih mengetahui masalah secara teknis.</p>
9	Jumat, 6 Juni 2014	BMI Kabupaten Kupang 9.993 Orang (TE, Hal: 13)	<p>Peningkatan jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bermigrasi ke luar negeri terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Data BP3TKI tahun 2010-2012 menunjukkan jumlah yang signifikan yakni 18.123 orang tenaga kerja NTT. Dengan rincian, laki 9.261 orang dan perempuan 8.862 orang.</p> <p>Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.993 adalah buruh migran yang berasal dari Kabupaten Kupang dengan perincian, laki-laki 4.590 orang dan perempuan 5.343 orang.</p> <p>Tingginya minat masyarakat NTT untuk bekerja di luar negeri dilatarbelakangi oleh berbagai faktor dan salah satu faktor dominan adalah persoalan ekonomi. Minat masyarakat harusnya ditunjang oleh kesiapan kapasitas buruh migran, terutama soal keterampilan dan informasi terkait hak-hak BMI.</p> <p>Pengentasan kemiskinan melalui migrasi aman merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh Yayasan Tifa dan Rumah Perempuan Kupang di Kabupaten Kupang dengan durasi waktu dua tahun yakni tahun 2012-2014.</p> <p>Strategi yang dikembangkan dalam program tersebut adalah dengan memberikan informasi penguatan kapasitas kepada masyarakat pada 10 desa intervensi di Kabupaten Kupang yakni Desa Noelbaki, Tanah Merah, Oebelo, Tuapukan, Oelnasi, Penfui Timur, Oeletsala, Bismarak, Niukbaun dan Desa Bolok.</p> <p>Rumah Perempuan Kupang membentuk gugus tugas perlindungan BMI dengan harapan gugus tugas</p>

			<p>sebagai ujung tombak dalam upaya perlindungan BMI di tingkat desa.</p> <p><i>Project Officer</i> Tifa NTT, Jhon Bria ketika memberikan sambutan pada pembukaan Lokakarya Gugus Tugas Perlindungan BMI di 10 Desa Kabupaten Kupang, di Hotel Olive, Kamis (5/6) mengatakan, lokakarya dilaksanakan untuk membuat gugus tugas menjadi <i>independen</i> di desa masing-masing. Karena itu, harus memiliki target yang lebih di desa.</p>
10	Jumat, 6 Juni 2014	Pol PP Cegah Trafficking Dari Desa (VN, Hal:11)	<p>Masalah <i>trafficking</i> yang belakangan ini marak terjadi di NTT mendorong sejumlah pihak untuk ambil bagian dalam penanganannya. Ketika banyak pihak sibuk dalam langkah kuratif mengurus TKW ilegal yang ditelantarkan sejumlah pintu perbatasan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur gugus tugas penanganan masalah tenaga kerja, justru membuat gebarakan dari akar masalahnya yakni desa asal para TKW.</p> <p>Kasat Pol PP Jhonson Hawula kepada VN. Kamis (5/6) menyampaikan pihaknya lebih fokus kepada langkah Preventif. Pencegahan dari hulu yakni di desa-desa. “Ini sejalan dengan program kerja mereka yakni melakukan pembinaan desa Sadar Ketentraman dan ketertiban Umum (trantibmum),” kata dia.</p>
11	Sabtu, 7 Juni 2014	KP3 Laut Amankan Belasan TKI (VN, Hal: 10)	<p>Pengiriman tenaga kerja secara ilegal keluar NTT belum juga surut meski begitu banyak kasus yang menimpa tenaga kerja NTT di luar daerah maupun diluar negeri. Pada Jumat (6/6) petang 11 wanita dan satu orang pria asal Sabu Raijua diamankan petugas KP3 Laut Tenau Kupang saat hendak menumpang kapal menuju Makasar. Para Calon TKI ditahan karena tidak memiliki dokumen perjalanan sebagai tenaga kerja. Belasan calon TKI/TKW itu adalah Agustina Djara (22), Lorian Ledede (23), Damaris Ledede Mehe (21), Katarina Bullu (27), Agustina Raga (20), Markus Ha’u (21), Elisabet Gia (18), Desiana Riwu (20), Damu Djami (37), Marilnce lay (25) Bendelina Seke (21), dan Bendelina Lay (20).</p> <p>Setelah didata di KP3 Laut Tenau, 12 Calon tenaga kerja itu diantar ke Dinas Nakerterans NTT untuk dipulangkan ke Sabu Raijua. Menurut rencana Hari ini mereka di pulangkan ke Sabu Raijua.</p>
12	Senin, 9 Juni 2014	Jimmy Sianto: Lucu Nakertrans Tidak Punya Data (PK, Hal: 3)	<p>Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melibatkan anak-anak NTT terus terjadi dan seakan tidak pernah tuntas. Penyebabnya adalah tidak adanya <i>data base</i> Tentang TKI/ TKW bermasalah pada dinas tenaga kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT.</p> <p>Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT yang membidangi Ketenagakerjaan, Jimmy Sianto Kepada Pos Kupang Jumat (6/6/2014). Dia menyampaikan itu menanggapi pemberitaan media ini yang mengatakan Dinas Nakertrans Provinsi NTT tidak memiliki <i>data base</i> tentang tenaga kerja asal NTT yang bermasalah.</p> <p>Menurutnya, alasan yang disampaikan bahwa dinas tidak memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penanganan masalah sehingga tidak memiliki data itu sangatlah tidak masuk akal.</p>

			<p>“Saya kira Dinas Nakertrans NTT tupoksinya mengurus masalah ketenagakerjaan. Kalau ada kasus-kasus seperti dan itu misalnya tupoksi dinas sosial, BP3TKI atau dinas lainnya. Tetapi tetap sebagai instansi yang mengurus tenaga kerja dan transmigrasi, dia wajib punya data. Karena kalau Disnakertrans tidak punya data tentang masalah ketenagakerjaan, ya apa yang bisa dibuat?” ujarnya.</p>
13	<p>Senin, 9 Juni 2014</p>	<p>9 Calon TKI asal Talibura Ditangkap (PK, Hal: 18)</p>	<p>Camat Talibura, Lorens Lilo dan aparat Pospol Nebe, Jumat (6/6/2014) siang menangkap sembilan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang diduga ilegal di Desa Nebe, Kecamatan Talibura. Kesembilan tenaga kerja ini tujuh orang akan dibawa ke Malaysia dan dua orangnya yakni dua wanita akan dibawa ke Papua guna menjadi pembantu rumah tangga. Tujuh tenaga kerja yang akan ke Malaysia akan dipekerjakan dengan gaji per-bulan Rp 3 juta selama dua tahun. Ketujuh tenaga kerja ini direkrut Anselmus Raja, warga Lewomada. Sedangkan dua wanita yang akan bekerja di Papua sebagai pembantu rumah tangga (PRT) direkrut Benedikta Bliti, warga Lewomada yang sedang bekerja di Papua sebagai PRT. Karolus Kewa, calon tenaga kerja yang ditemui wartawan di Mapolres Sikka, Jumat (6/6/2014) sore menjelaskan, ia dan teman-temannya direkrut Anselmus Raja di kampung guna dibawa ke Malaysia untuk menjadi TKI di negeri jiran tersebut.</p>
14	<p>Rabu, 11 Juni 2014</p>	<p>Tindak tegas Pelaku Trafficking (VN, hal: 11)</p>	<p>Pihak kepolisian diminta untuk menindak tegas para pelaku <i>human trafficking</i> baik oknum penyalur, PJTKI, pejabat pemerintah yang terlibat termasuk para tenaga kerja yang membiarkan dirinya dikirim sebagai TKI ilegal. Setelah itu pembenahan pengurusan administrasi kependudukan perlu dipermudah sehingga tidak menyebabkan para TKI tidak memilih jalan pintas untuk bekerja diluar negeri secara ilegal. Demikian benang merah yang disampaikan sejumlah tokoh yang hadir dalam rapat bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di aula Bappeda NTT, Selasa (10/6). Anggota DPD RI, Lalu Supardan menilai, seharusnya istilah TKI Ilegal tidak perlu ada jika semua pihak menghargai (UU) dan ketentuan yang berlaku. Kalau masih ada saja yang melanggar maka wajib di tindak tegas.</p>
15	<p>Senin, 13 Juni 2014</p>	<p>Polisi Tahan Perekrut TKI di Talibura (PK, Hal: 11)</p>	<p>Aparat penyidik Polres Sikka telah mengeluarkan surat perintah bagi Anselmus Raja, perekrut tujuh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan di pekerjakan ke Malaysia. Anselmus ditahan sejak Sabtu (7/6/2014) sore sesuai diperiksa. Anselmus dijerat UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang. Kapolres Sikka, AKBP Budi Hermawan, SIK melalui Kasat Reskrim, Iptu. Wirhan Arif, di Mapolres Sikka, Senin (9/6/2014) pagi, menegaskan Anselmus Telah ditahan di Sel Mapolres Sikka kaerna diduga</p>

			melakukan tindak pidana sesuai UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja di Luar Negeri dan UU perdagangan orang.
16	Senin, 13 Juni 2014	Penyelesaian Masalah TKI Dilematis (TE, Hal: 1, 7)	<p>Tujuh orang anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah Pendidikan, Agama, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Ketenagakerjaan, berkunjung ke NTT, pekan ini. Kehadiran para Wakil Rakyat ini bertujuan untuk mengawasi Pelaksanaan Undang-Undang UU Nomor 39 tahun 2004 seta monitoring pelaksanaan monitoring kurikulum pendidikan 2014.</p> <p>Tujuh orang anggota komite III DPR RI yang hadir di Kupang itu, yakni Abraham Paul Liyanto (NTT), Alvinus Lomban (Sulut), Maria Goreti (Kalbar), Abdi Sumartini (Banten), KH. Sofyan Yahya (Jawa Barat), Lalu Supardjan (NTB), dan Bahar Busan (Bangka Belitung).</p> <p>Dalam kunjungan itu salah satu yang menjadi fokus masalah adalah ketenagakerjaan. Sebagaimana dialog yang terjadi di ruang Bappeda NTT, Selasa (10/6), Komite II DPRD RI dan komponen terkait seperti, Pemprov NTT, Polda NTT, Lantamal VII, serta lembaga terkait lainnya serius membicarakan problematika terkait TKI/TKW di NTT. Asisten I Setda NTT, Johanna Lisaplay yang mewakili Gubernur dalam pertemuan itu mengapresiasi kunjungan Komite III DPD RI ke NTT, dimana para wakil rakyat ini memberikan perhatian khusus terhadap nasib TKI khususnya yang berasal dari daerah NTT.</p>
17	Senin, 16 Juni 2014	Calon TKW Hilang di Penampungan (TE, Hal: 12)	<p>Salah satu calon tenaga kerja wanita (TKW) bernama Maria Fatima Meo (21), yang ditampung di tempat transit PT. Halgoni Alfa Abadi, Kupang, yang terletak di jalan Hans Kapitan No 8 RT 017/RW 007, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, sejak Rabu (11/6) sekira pukul 21.00 Wita dilaporkan menghilang dari tempat penampungan tersebut, dan hingga kini keberadaannya masih belum diketahui.</p> <p>Fatima diketahui menghilang saat para calon TKW di penampungan satu per satu diabsen, untuk mengecek kelengkapan masing-masing, namun ternyata saat diabsen Fatima tidak berada di penampungan lagi.</p> <p>Dalam laporan polisi yang diajukan Adrianus Ndoen (40), sebagai penanggung jawab penampungan mencantumkan Helena Pakpahan sebagai saksi yang mengecek Fatima di kamarnya. Ketika dicek Helena menemukan alat tes kehamilan yang hasilnya positif di tas milik Fatima, yang berada di dalam kamarnya. Hal ini pun dilaporkan Helena kepada Adrianus sebagai penanggung jawab. Adrianus mencurigai, alat tes tersebut milik Fatima dan kemungkinan ia sedang hamil sehingga kabur dari tempat penampungan.</p> <p>Merasa kuatir akhirnya Adrianus melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Kupang Kota, Jumat</p>

			(13/6) sekira pukul 17.30 Wita yang diterima Bripka A. H. Harun guna dilakukan penyelidikan lebih.
18	Selasa, 17 Juni 2014	Ampera Tuntut Penyelesaian Kasus TKW Medan (VN, Hal: 9)	<p>Aliansi Melawan Perdagangan Orang (Ampera) NTT akan menggelar aksi anti <i>trafficking</i> pada hari ini selasa (17/6) berhubung belum di tuntaskan kasus yang menimpa 25 TKW asal NTT di Medan, Sumatera Utara. Aksi kemanusiaan yang berupa <i>long march</i> ini dimulai dari depan Kampus Unwira Merdeka menuju Polda NTT.</p> <p>Romo Dedy Ladjar, Pr selaku Koordinator Umum Ampera dalam jumpa pers di Kantor IRGSC, Senin (16/6) menjelaskan, aksi tersebut dilatar belakangi oleh kasus yang menimpa 25 orang TKW asal NTT di Medan. Aksi ini bertujuan untuk menuntut penegakan hukum oleh aparat kepolisian. “Karena informasi yang kami peroleh tersangka dalam kasus ini yang bernama Mohar ternyata sudah dilepaskan kini di duga kuat sudah ada di luar negeri,” ujarnya.</p>
19	Rabu, 18 Juni 2014	Orang NTT Sering Diperdagangkan Karena Murah (TE, Hal: 9, 10)	<p>Selama ini terus menjadi ladang subur para pelaku perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>). Bukan hanya sekali, melainkan sudah berulang kali, warga NTT diperjualbelikan dengan modus hendak dijadikan TKW, namun ternyata dijual lagi di negara lain. Malah sering di dalam negeri. Kondisi ini disebabkan karena harga orang NTT sangat murah. Fakta ini mencuat dalam aksi sejumlah organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam Aliansi Melawan Perdagangan Orang (Ampera) NTT. Selasa (17/6) pukul 09.00 Wita kemarin mereka melakukan <i>long march</i> dari depan Kampus Unwira Kupang dan tiba di depan Mapolda NTT sekira pukul 12.30 Wita yang dilanjutkan dengan aksi treatrikal.</p> <p>Selama <i>long march</i>, arus lalu lintas di sepanjang Jl. A Yani, Moh Hatta dan Jendral Sudirman Kuanino, Jendral Soeharto Naikoten lumpuh bahkan macet total di depan Mapolda NTT. Beberapa sosok ternama di kota Kupang seperti mantan Ketua Panwaslu Kota Kupang Wilson Therik, Dekan Fakultas Hukum Unwira Roni Talan dan Romo Leo Mali, ikut terlibat. Sedangkan organisasi yang terlibat aksi tersebut yakni, CIS Timor, GMKI, Sekolah Musa, J-Ruk, Fakultas Theologi UKAW, J-PIT, IRGSC, Senat Fisip dan Fakultas Hukum Unwira, PIAR, Ama Kupang, Permasna, BEM Fakultas Hukum PGRI, Permada Kupang, H2K, Pikul, BLM Fakultas Undana, Kompak, dan Rumah Perempuan. Di Depan Mapolda NTT ratusan massa ini ingin masuk dan bertemu dengan Kapolda NTT Brigjen Pol Ketut Untung Yoga Ana, namun ditahan petugas keamanan Polda. Satu persatu massa mulai melakukan orasinya yang diawali pengungkapan kronologis kejadian dan bentuk perlakuan tidak manusiawi dari para pelaku seperti, kekerasan dan pelecehan seksual. Setelah itu, massa menuntut Kapolda NTT turun ke jalan untuk bertemu dan mendengar keluh kesah korban penyekapan serta massa ingin mendengar langsung sikap Kapolda menindaklanjuti kasus yang menimpa 26 warga NTT itu. Datang dengan maksud untuk meredam aksi tersebut, perwira Polda tidak digubris massa, malah aksi adu mulut sempat terjadi</p>

			antara Koordinator Lapangan Gregorius Daeng dengan beberapa perwira.
20	Rabu, 18 Juni 2014	Ampera Minta Kapolri Ambil Alih Kasus TKW Medan (VN, Hal: 9)	<p>Ratusan Orang yang tergabung dalam Aliansi Menolak Perdagangan Orang (Ampera) melakukan <i>Long march</i> dari depan Kampus Universitas Widya mandira (Unwira) Kupang menuju Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (17/6) pagi. Mereka menyampaikan 13 tuntutan terkait perdagangan dan perbudakan terhadap warga NTT di sejumlah daerah di Tanah Air seperti kasus perbudakan yang terjadi di Medan, Sumatera Utara yang mengakibatkan tewasnya dua pekerja.</p> <p>Lembaga yang tergabung dalam aliansi ini berjumlah 84, antara lain Senat BPM Fakultas Hukum Unwira, BEM Fakultas Kedokteran Undana, KMK FISIP Undana, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perkumpulan Pikul, Rumah Perempuan dan CIS Timor, meminta Kapolri untuk menyelesaikan Kasus TKW Medan.</p>
21	Kamis, 19 Juni 2014	TKW Ilegal NTT Dijual Rp5 Juta per Kepala(VN, Hal:11)	<p>Sungguh memprihatinkan perempuan asal NTT yang dikirim secara ilegal untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malaysia melalui Batam- Kepulauan Riau dijual para perekrut seharga Rp. 5 juta per orang. Bukan hanya itu setelah transaksi tertutup itu para TKW harus diberangkatkan secara ilegal.</p> <p>Informasi ini disampaikan Tania Kase (28), pekerja pada PT Budi Mulia, Perusahaan penyalur TKI di Pekanbaru, Riau ketika bertemu VN di kantor bupati TTS, Selasa (17/6).</p> <p>Tania mengatakan hampir setiap hari ada transaksi jual beli TKW ilegal asal NTT di Batam. Hal ini terjadi karena hampir setiap hari pula ada TKW ilegal yang turun dari bandara Nadim-Batam yang dikirim Perekrut TKW di Kupang-NTT</p>
22	Sabtu, 21 Juni 2014	Pemenuhan Lapangan Kerja Tugas Negara (TE, Hal: 13)	<p>Pemenuhan kebutuhan lapangan kerja harus diupayakan dan dipikirkan oleh negara. Pasalnya, salah satu tujuan dari terbentuknya negara adalah mengupayakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>“Kebutuhan akan lapangan kerja adalah sebagian dari hak asasi setiap orang. Hak ini terkait dengan hak atas kesejahteraan (hak ekonomi) dan menjadi hal paling fundamental bagi hak hidup seseorang. Untuk itu, secara konstitusional mengupayakan lapangan kerja adalah mandat resmi bagi negara dan birokrasi pemerintah yang melayani negara,” ungkap dosen Fakultas Filsafat Unwira Kupang, sekaligus Pembina Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan Kupang, Romo Leo Mali pada acara Seminar Migrasi Aman dengan tokoh lintas agama se-Kabupaten Kupang yang diselenggarakan Yayasan Tifa dan Rumah Perempuan Kupang di Hotel Olive Kupang, Jumat (20/6).</p> <p>Ia menegaskan, kadang seorang pemimpin daerah baik gubernur dan bupati dalam kegiatan wisuda selalu berkata, lulusan sarjana jangan mengharapakan lapangan kerja dari pemerintah, tetapi bagaimana menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut sebenarnya tidak boleh dikatakan seorang pemimpin daerah. Karena, secara konstitusional mengupayakan lapangan kerja adalah mandat resmi bagi negara dan</p>

			<p>birokrasi pemerintah yang melayani negara.</p> <p>Berkaitan dengan tugas tokoh agama, kata Rm Leo, dalam perspektif Katholik, setiap orang anggota gereja mengemban tiga tugas Kristus yakni, nabi, gembala serta imam. “Berkaitan dengan buruh migran, apa yang bisa dilakukan tokoh agama, mengajarkan penghargaan yang benar terhadap martabat manusia, mengajarkan penghargaan terhadap setiap bentuk pekerjaan dan mengajar umat untuk menghargai semua profesi yang didalamnya termasuk mengajar umat untuk memikirkan sistem tata kelola yang manusiawi pada bentuk-bentuk profesi dan lapangan kerja,” ungkapnya.</p> <p>Dikatakan, seorang tokoh agama juga dapat mengajarkan umat/para pencari kerja untuk menyiapkan diri dengan baik dengan mengikuti aturan-aturan sebagai syarat untuk membuat profesi/pekerjaan yang dipilih bermartabat dan dihargai orang lain. gereja dan masjid juga bisa menjadi pusat informasi tentang lapangan kerja serta syarat-syarat untuk bekerja dengan aman.</p> <p>“Seorang tokoh agama dalam perspektif Katholik adalah seorang gembala dengan tugas utamanya adalah menjaga keselamatan umat. Karena itu, ia harus memastikan bahwa umatnya yang hendak bekerja di tempat lain akan mengalami keadaan yang lebih baik. Untuk itu, semua proses harus dipastikan dengan baik sejak persiapan, penempatan dan perlindungan selama di tempat bekerja,” jelasnya.</p>
23	Minggu, 22 Juni 2014	Polisi Gagalkan Calon TKI ke Malaysia (PK, Hal: 4)	<p>Aparat kepolisian dari Kesatuan Pelaksana Pengaman Pelabuhan (KP3) Laut, Tenau Kupang, menggalkan penyelundupan 19 orang calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.</p> <p>Wakil Kepala Polres Kupang Kota, Komisaris Polisi (Kopol) , Yulian Perdana, SIK kepada <i>Kompas.com</i>, Sabtu (21/6/2014) mengatakan, sebagian dari calon TKI itu adalah tenaga kerja ilegal. Mereka diamankan di Pelabuhan Tenau Kupang setelah menaiki Kapal Motor Bukit Siguntang.</p> <p>“Saat penindakan tadi, perekrut tenaga kerja bernama Flori melarikan diri. Padahal para tenaga kerja telah menyerahkan sejumlah uang kepada Flori. Sampai saat ini Flori masih dalam pengejaran petugas dan satuan tugas terpadu tenaga kerja Provinsi NTT,” kata Yulian.</p>
24	Senin, 23 Juni 2014	KP3 Laut Amankan 19 TKI Ilegal (VN, Hal:11)	<p>Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Laut Tenau Kupang kembali mengamankan 19 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal, Jumat (20/6) sekitar pukul 15.30 Wita. Para TKI yang akan diberangkatkan dengan kapal motor Bukit Siguntang ini berasal dari Kabupaten Malaka dan TTS tujuan Malaysia diamankan karena tidak memiliki dokumen resmi.</p> <p>Hal ini dikemukakan Wakil Kapolres Kupang Kota Kopol Yulian Perdana kepada VN, Sabtu (21/6). Dia mengatakan, pengamanan para TKI ini dipimpin langsung Kepala KP3 Laut Iptu. Benediktus Min ketika kapal Bukit Siguntang hendak berangkat.</p>

			<p>Para TKI ini, kata dia, dicurigai karena berjalan bergerombolan dan setelah diselidiki tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan yang resmi. Dia menjelaskan 19 TKI ini antara lain 12 orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. “Diantara mereka ada lima orang anak di bawah umur. Diantara lima orang itu, tiga orang diantaranya masih balita,” kata Yulian</p>
25	Minggu, 24 Juni 2014	19 Canaker Ilegal Dipulangkan (TE, Hal: 10)	<p>Sebanyak 19 Orang calon tenaga kerja (Canaker) ilegal yang di amankan di Tanjung Lontar tenau, Kupang sekira pukul 15.30 wita, Jumat (20/6) lalu telah di pulangkan ke keluarga masing-masing. Wakapolres Kupang Kota, Kompol Yulian Perdana saat dikonfirmasi di Mapolresta, Senin (23/6) kemarin, mengatakan pemulangan canaker ilegal dilakukan, setelah piahaknya berkordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTT.</p> <p>Para canker sebelumnya diamankan aparat kepolisian KP3 Laut Tenau, Polres Kupang Kota yang dipimpin Oleh Iptu. Benediktus Min, saat hendak diberangkatkan dengan KM. Bukit Siguntang. Canaker ilegal berasal dari Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTS yang tergolong dari 12 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, sebelas orang tergolong dewasa, 5 orang di bawah umur dan 3 balita.</p>
26	Rabu, 25 Juni 2014	TKI Batam Sudah Dipulangkan (VN, Hal: 11)	<p>Sebagian TKI asal NTT yang ditelantarkan di Batam oleh majikannya beberapa waktu lalu sudah di pulangkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT telah mengirim seorang staf untuk mengurus pemulangan para TKI Tersebut.</p> <p>“Jumlah persisnya saya kurang ingat. Namun sebagian diantara mereka sudah dipulangkan, sementara yang lainnya sedang dalam proses,” Kata Kepala Dinas Nakertrans Simon Tokan yang di temui, Selasa (24/6).</p> <p>Dia mengatakan, selain staf dari Dinas Nakertrans yang di berangkatkan ke Batam, juga ada tim dari DPRD NTT untuk mengurus masalah tersebut. Namun persoalan yang dihadapi di sana, perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja merupakan perusahaan ilegal sehingga sulit dicari pelakunya.</p> <p>Dia menambahkan, polisi sedang mengejar pelaku pengiriman para TKI sehinga diharap bisa terungkap jaringan sindikat ini. Dengan begitu pengiriman TKI secara illegal dari NTT dapat diminimalisir.</p>
27	Kamis, 26 Juni 2014	Padma NTT: Apa Maunya Migrant Care (PK, Hal: 5)	<p>Pelayanan Advokasi Untuk keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), menilai, kritikan Anis Hidayah dari Migran Care terkait bantuan Prabowo Subianto terhadap TKI Wilfrida Soik karena ingin menjatuhkan nama baik Prabowo jelang pemilihan presiden 9 Juli 2014 mendatang.</p> <p>“Jangan melihat kebaikan Prabowo dari sisi negatif. Mungkin saja <i>Migran Care</i> tidak puas dengan apa yang diperbuat Prabowo. Apa yang telah dilakukan Prabowo Subianto dalam membantu pembebasan Wilfrida Soik tepat sasaran dan tidak berada dalam tikungan seperti yang disampaikan <i>Migrant Care</i></p>

			(Anis Hidayah),” kata koordinator (Padma) Indonesia Wilayah NTT, Felixianus Ali, Rabu (25/6/2014).
28	Sabtu, 28 Juni 2014	Dewan Tuntut Tuntaskan Kasus TKW Batam (VN, Hal: 10)	<p>DPRD NTT menuntut penuntasan proses hukum bagi para perekrut TKW yang saat ini belum ada penyelesaian. Dewan juga menuntut Pemerintah Provinsi NTT untuk memberikan klarifikasi terkait kasus-kasus TKW yang terjadi termasuk TKW Batam.</p> <p>Dewan mengancam tidak akan menyetujui anggaran untuk Nakertrans jika tidak segera mempertanggungjawabkannya di hadapan Dewa.</p> <p>Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT Jimmy Sianto kepada VN, Jumat (27/6) mengatakan, kasus TKW Batam sudah harus diproses hukum. Dewan akan terus mendorong pemerintah dengan aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus tersebut karena merupakan tindak pidana.</p> <p>“Kami secara tegas meminta kepada Gubernur untuk membenahi dan berkomitmen dalam menyelesaikan kasus TKI/TKW di NTT, sebab masalah ini tidak bisa terpenggal-penggal dalam penyelesaiannya,” ungapnya.</p>